

Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Ivodia Palupi

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang

Kode Pos 50275, Telepon/Faksimile (024)7465407

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Money politics is a phenomenon that often occurs in the context of general elections, including in the 2024 Presidential Election (Pilpres). In this research, the author examines the practice of money politics carried out by the presidential candidate success team in Widodaren Village, Petarukan District, Pemalang Regency. This research aims to understand how these practices influence people's choices and local political dynamics. The practice of money politics is carried out with various strategies aimed at: attract attention and support from voters. Successful teams seek to influence voter decisions through various means, including giving money, goods, or attractive promises. This research also highlights the factors that influence the occurrence of money politics, as well as the actors involved in this practice. Through a qualitative approach, the author collects data from various sources, including interviews with voters, direct observation, and document analysis. The data obtained was then analyzed to provide a comprehensive picture of the practice of money politics in the region. It is hoped that this research can contribute to understanding the impact of money politics in general elections. The research results show that money politics has a significant influence on people's choices in Widodaren Village. People tend to vote for candidates who provide rewards, even though they realize that this practice is unethical. These findings emphasize the need for efforts to increase public awareness about the negative impact of money politics and the importance of integrity in the general election process.

Keywords: *Money Politics, Democratic Practices, Election Integrity, 2024 Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen fundamental dalam demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pemimpin yang mewakili aspirasi mereka. Prinsip utama dalam pemilu adalah kebebasan, keadilan, dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena politik uang. Politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu karena dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat.

Praktik politik uang, yang melibatkan pemberian uang atau imbalan material lainnya kepada pemilih, telah lama menjadi masalah dalam proses pemilu di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga menciptakan ketergantungan masyarakat pada politik transaksional. Dalam konteks Pilpres 2024, praktik politik uang diperkirakan tetap menjadi strategi utama yang digunakan oleh berbagai aktor politik untuk memengaruhi hasil pemilu.

Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang membuatnya rentan terhadap praktik politik uang. Desa ini menunjukkan dinamika politik lokal yang

spesifik, di mana faktor ekonomi, budaya, dan literasi politik masyarakat berperan penting dalam menentukan pola perilaku pemilih. Pada pemilu sebelumnya, indikasi praktik politik uang di wilayah ini cukup tinggi, menjadikannya studi kasus yang relevan untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik politik uang, strategi yang digunakan, aktor-aktor yang terlibat, serta dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi praktis untuk memitigasi dampak negatif politik uang dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Dari segi teoretis, hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang politik uang dan pemilu di Indonesia. Dari segi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memerangi politik uang dan memperkuat integritas proses demokrasi.

METODE

Jenis dan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena praktik politik uang secara mendalam di Desa Widodaren. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali pandangan, pengalaman, dan motivasi aktor yang terlibat dalam praktik politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi dinamika praktik politik uang pada Pilpres 2024. Pendekatan studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap peristiwa di lokasi tertentu, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi fenomena tersebut.

Lokasi penelitian adalah Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang. Desa ini dipilih karena indikasi kuat praktik politik uang yang terjadi selama pemilu sebelumnya. Selain itu, kondisi ekonomi dan budaya masyarakat desa ini memberikan konteks yang relevan untuk studi politik uang.

Subjek penelitian meliputi:

- **Aktor langsung:** Tim sukses, relawan kampanye, perangkat desa, dan pemilih.

- **Aktor tidak langsung:** Kandidat, partai politik, dan penyandang dana.
- **Pihak pengawas:** Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan kelompok pengawas masyarakat.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan Data Primer yang meliputi dengan Wawancara mendalam dengan informan kunci seperti tim sukses, pemilih, dan pengawas pemilu. Dan menggunakan Data Sekunder dengan menganalisis dokumen terkait, termasuk laporan hasil pemilu, berita lokal, dan data statistik desa. Hal tersebut juga menggunakan Teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan terkait politik uang. Selain itu, dengan menggunakan observasi secara langsung peneliti mengamati secara langsung kegiatan kampanye, distribusi bantuan, dan interaksi antara aktor politik dan masyarakat. Dengan dilakukannya dokumentasi pengumpulan data berupa foto, video, dan dokumen resmi untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

Analisis data yang dilakukan data dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-

pola utama dalam praktik politik uang. Proses analisis meliputi tiga tahap: pengkodean awal, pengelompokan tema, dan interpretasi hasil. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini mematuhi prinsip kerahasiaan dan persetujuan informan. Setiap informan diberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan penelitian dan hak mereka untuk menarik diri dari wawancara kapan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Strategi Politik Uang

- **Vote Buying:** Bentuk paling umum dari praktik politik uang yang ditemukan di Desa Widodaren adalah pembelian suara. Hal ini dilakukan melalui pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih. "Serangan fajar" merupakan waktu yang paling sering digunakan untuk mendistribusikan uang. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula juga digunakan untuk menarik simpati pemilih.
- **Pork Barrel:** Janji-janji pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bentuk strategi politik uang. Kandidat menawarkan proyek seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, atau pemberian subsidi kepada kelompok-kelompok tertentu di desa. Strategi ini

menarik karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat lokal.

2. Aktor yang Terlibat

- **Aktor Langsung:** Tim sukses memainkan peran utama dalam distribusi uang dan barang. Mereka beroperasi di lapangan untuk memastikan pemilih menerima "imbalan" yang telah dijanjikan. Selain itu, perangkat desa sering kali turut membantu dalam mengidentifikasi pemilih yang dianggap strategis.
- **Aktor Tidak Langsung:** Kandidat dan partai politik merupakan penyandang dana utama. Mereka menyediakan anggaran besar untuk membiayai aktivitas tim sukses di lapangan. Peran mereka sering kali tersembunyi tetapi sangat signifikan dalam pengaturan strategi dan pendanaan.

3. Faktor Pendorong

- **Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi:** Desa Widodaren memiliki populasi yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Pendapatan yang rendah dan ketergantungan pada bantuan menjadikan mereka target empuk bagi praktik politik uang.
- **Budaya Lokal:** Dalam budaya setempat, menerima pemberian dari kandidat sering kali dianggap sebagai bentuk "rezeki" yang tidak boleh ditolak. Hal ini memperkuat normalisasi praktik politik uang.
- **Rendahnya Literasi Politik:** Kurangnya

pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pemilu menyebabkan mereka lebih fokus pada manfaat jangka pendek.

4. Dampak terhadap Partisipasi Politik

Politik uang menghasilkan pola partisipasi politik yang tidak sehat. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan imbalan yang diterima, bukan pada visi, misi, atau kapabilitas kandidat. Hal ini merusak prinsip demokrasi dan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

5. Upaya Pencegahan dan Solusi

- **Edukasi Politik:** Edukasi politik perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan sosialisasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang dampak jangka panjang politik uang terhadap kehidupan mereka.
- **Pengawasan yang Lebih Ketat:** Lembaga pengawas seperti Bawaslu harus dilibatkan secara aktif dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran.
- **Pemberdayaan Ekonomi:** Program ekonomi berbasis komunitas dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan dari kandidat politik.

PENUTUP

Kesimpulan

Praktik politik uang dalam Pemilihan Presiden 2024 di Desa

Widodaren menunjukkan bahwa fenomena ini tetap menjadi ancaman besar bagi demokrasi di tingkat lokal. Faktor-faktor utama yang mendorong praktik politik uang meliputi kemiskinan, budaya lokal yang permisif, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Dampaknya sangat merugikan karena menurunkan kualitas partisipasi politik dan memperkuat pola transaksional dalam pemilu. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik untuk mengatasi fenomena ini.

Saran

1. **Pemberdayaan Ekonomi:** Pemerintah perlu mempercepat implementasi program-program pemberdayaan ekonomi di desa-desa rentan. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada politik uang.
2. **Edukasi Politik:** Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil perlu menjalankan program edukasi politik secara berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politik uang terhadap demokrasi.
3. **Penguatan Pengawasan Pemilu:** Lembaga seperti Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas pengawas di tingkat desa. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan pemilu melalui pelatihan sebagai pengawas independen.
4. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Penegak hukum harus menindak tegas pelaku politik

uang, baik pemberi maupun penerima. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara Bawaslu, polisi, dan kejaksaan untuk memastikan sanksi yang efektif.

5. Penelitian Lanjutan: Penelitian mendalam mengenai pola-pola baru dalam politik uang perlu terus dilakukan untuk memberikan rekomendasi berbasis data bagi pengambil kebijakan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pemilu di tingkat lokal dapat ditingkatkan, sehingga tercipta demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, M. T. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap aturan money politic dalam Undang-Undang pemilihan umum di Indonesia (Studi Pasal 515 Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum). IAIN Padangsidimpuan.
- Arifin, Zainal & Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aspinall, E., Sukmajati, M., & Universitas Gadjah Mada. Research Centre for Politics and Government. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Assiddiqie, Jimly (2004). *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: UU Press
- Budiardjo, Miriam (Eds.). (1981). *Partisipasi Dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia Hlm. 2.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Mycological Research, 94(4). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994, Hlm. 965.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm 16.
- Goffar, Janedri M (2012). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lessig, L. (2019). *They Don't Represent Us And Here's How They Could: A Blueprint for Reclaiming Our Democracy* (pp. 40–85). New York: Harper Collins Publishers.
- Mahfud MD, Moh (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 60.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Nugroho, Heru (2011). *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 95.
- Perludem. (2024). *Handbook Buku Panduan: Partisipasi Pemuda Pada Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: Perludem.
- Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan,” *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021).
- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2).
- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Provinsi

- Banten. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 592–606.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (1st Ed.). Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl.
- Bari, F. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282.
- Budiyanti, A. (2022). Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1–10.
- Cucu Sutrisno (2017). “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada”. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No 2.
- Fauzi, F. Z., & Kusumasari, B. (2020). Public-private partnership in Western and non-Western countries: a search for relevance. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 26(1), 87–102. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-08-2019-0071>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Fitriyah, (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkades Di Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Fitriyah. (2013). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 3, No. 1 Hlm. 2
- Fitriyah, L., & Haryanto, D. (2023). "Edukasi Politik dan Pencegahan Politik Uang di Pemilu Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 18(2), 145-160.
- Fryda Lucyani, D. (2009). Bab I Pendahuluan & pendidikan politik. *Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Hakim, A., & Widodo, P. (2021). "Kemandirian Ekonomi dan Hubungannya dengan Politik Uang." *Jurnal Ekonomi Desa*, 9(3), 210-225.
- Halili, “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)”, *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)* 14 , no. 2, (2009): 100. accessed Oktober 10, 2024, <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2636>.
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, 14(2), 100. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2636>.

